

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akbar, Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Dalimunte, Chadijah. *Politik Hukum Agraria Nasional Terhadap Hak-Hak Atas Undang-Undang Rumah Susun*. Medan: Yayasan Pencerahan Mandailing. 2008.
- Hutagalung, Aries S. *Condominium dan permasalahannya*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2005.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2005.
- Parlindungan, AP. *Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman dan Undang-Undang Rumah Susun*. Bandung: Mandar Maju. 2001.
- Ramelan, Eman. *Problematika Hukum Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Pembebasan dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana. 2017.
- . *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*. Jakarta: Prenada Media. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Soemardjono, Maria S.W. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Supriyadi. *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2010.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Rumah Susun dan Apartemen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Thamrin, Husni. *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Kode Etik PPAT Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017.

C. Internet, Jurnal, dan Makalah

Santoso, Urip. 2012. “Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional” dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Yogyakarta. <https://media.neliti.com>, diakses tanggal 18 Juli 2019 pukul 09.00.

Stephanie. “Analisa Yuridis Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Transaksi Jual Beli Atas Satuan Rumah Susun Berstatus Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan”. repository.uph.edu. diakses tanggal 13 Juli 2019.

Brenda. 2014. “Rumah Susun Sederhana (Rusunawa) di Kota Pontianak”. Jurna Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura, Pontianak. <https://www.neliti.com>, diakses tanggal 23 Februari 2019 pukul 21.30.

Huslan, Olivia Yanuari. Skripsi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perpanjangan HGB di Atas Hak Pengelolaan” dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2016 diakses pada tanggal 26 Oktober 2019, pukul 23.53.

Sumardjono. 2007. “Hak Pengelolaan : “Perkembangan dan Implementasinya” dalam Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, Yogyakarta, <https://jurnal.ugm.ac.id>, diakses tanggal 26 Oktober 2019, pukul 23.54.